

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. (Iskandar, 2013:315). Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Kebijakan ekonomi makro ini akan selalu diperlukan untuk mencegah dan menghilangkan gejala ekonomi makro yang tidak diinginkan seperti tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran dan neraca pembayaran yang sedang mengalami defisit. Kebijakan ekonomi makro tersebut dapat bersifat ekspansi maupun kontraksi, ketika perekonomian menghadapi peningkatan pengangguran dan kapasitas produksi nasional bersifat *unemployment*, maka harus dilakukan kebijakan yang bersifat ekspansi, contohnya defisit neraca pembayaran, sedangkan kebijakan kontraksi digunakan apabila perekonomian dalam keadaan *over employment* yaitu permintaan agregatif melebihi kapasitas produksi nasional, contohnya inflasi yang tinggi.

Tujuan dari kedua kebijakan ekonomi makro tersebut baik ekspansi maupun kontraksi adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi serta memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri. Dan cara pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian tersebut adalah dengan mengelola instrumen variabel pajak (*tax*), penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Reksoprayitno: 2000:251).

Pajak merupakan instrumen makro ekonomi yang berhubungan erat dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dimana efektivitas penerimaan pajak dapat dilihat dari hasil laporan realisasinya. Jika realisasinya lebih besar daripada yang dianggarkan, maka efektivitas penerimaan pajak berjalan dengan baik. Dari sisi pajak inilah dapat digambarkan jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri dapat meningkatkan jumlah *output*. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan *output* industri secara umum.

2.1.2 Kebijakan Moneter

Menurut Nurul (2012:45) Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Menurut Iskandar (2013:314) Kebijakan moneter dapat digolongkan

menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / *Monetary Expansive Policy*, Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / *Monetary Contractive Policy*, Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policu*).

Menurut Pohan (2008:31-34), Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang

beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.1.2.1. Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : konsumsi masyarakat yang meningkat, terlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Rachmat dan Maya, 2011:115). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus, harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga

yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah.

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengarahannya dana masyarakat karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi turun (Pohan, 2008:52). Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun.

2.1.2.2. Suku Bunga

Menurut Rahmat dan Maya (2011:103), suku bunga adalah nilai yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik, yang ditentukan oleh 2 faktor yaitu permintaan akan modal (*demand for capital*) dan penawaran akan modal (*supply of capital*). *BI Rate* diumumkan oleh dewan gubernur Bank Indonesia, setiap rapat dewan gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sejak awal juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme “*BI rate*” (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. *BI rate* ini yang kemudian digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelanggan, sehingga kebijaksanaan pengenaan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut pada awalnya hanya diberikan sebagai pedoman saja untuk bank umum pemerintah, namun kemudian dijadikan juga sebagai landasan bagi bank swasta.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan disuku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan (Dahlan, 2001:131).

2.1.2.3. Nilai Tukar

Nilai tukar adalah harga satu unit dari uang luar negeri (asing) dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Suatu kenaikan nilai tukar disebut depresiasi atau pengurangan nilai mata uang dalam negeri dengan hubungannya dengan mata uang asing, sedangkan penurunan kurs tukar disebut apresiasi atau kenaikan nilai mata uang dalam negeri dalam hubungannya dengan mata uang asing (Rahmat dan Maya, 2011:131). Kebijakan nilai tukar mata uang besar pengaruhnya terhadap kegiatan transaksi perusahaan, terutama perusahaan yang tergantung pada impor dan yang berorientasi pada pasar luar negeri dengan mata uang asing. Hal ini dapat terjadi karena besarnya nilai tukar akan mempengaruhi harga barang yang diperdagangkan, sekaligus berpengaruh terhadap besarnya investasi dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan mata uang asing.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Atau definisi pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. (Iskandar, 2013: 411).

Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya seperti di bawah ini:

1. Faktor sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena SDM merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari pembangunan tersebut

2. Faktor sumber daya alam (SDA).

SDA atau sumber daya alam merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Akan tetapi jika bergantung pada sumber daya alam saja tidak akan menjamin kesuksesan dalam proses

pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, jika tidak di dukung dengan kemampuan SDM (Sumber daya manusia) dalam mengelola SDA (sumber daya alam) yang ada. Sumber daya alam misalnya seperti: kesuburan tanah, kekayaan akan mineral, kekayaan tambang, hasil alam, laut dan lain sebagainya.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin pesat khususnya di bidang teknologi, hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya penggantian dalam memproduksi barang yang asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin yang canggih dan modern yang tentunya akan lebih efisien dan lebih cepat dalam menghasilkan produk, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

4. Faktor budaya.

Faktor yang penting lainnya yaitu faktor budaya, faktor ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki fungsi sebagai pendorong proses pembangunan misalnya seperti kerja keras, bersikap jujur, sopan, dan lain-lain. Akan tetapi faktor ini bisa juga menghambat proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi misalnya seperti sikap egois, anarkis, dan sebagainya.

5. Sumber daya modal.

Dan faktor yang terakhir adalah sumber daya modal, faktor ini sangatlah dibutuhkan manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas dari Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Sumber

daya modal ini misalnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi, sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi.

Istilah pertumbuhan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pertumbuhan. Secara tradisional pertumbuhan memiliki peningkatan terus menerus pada *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pertumbuhan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Pendapat mengenai definisi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill), maupun para ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, Ekonomi

Pembangunan, Penerbit FEUI, 1985)

Terdapat tiga komponen pokok dalam definisi pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu :

1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari pertumbuhan ekonomi sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) pada negara bersangkutan.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkesinambungan dimana pemerintah berperan dalam investasi bidang pendidikan.
3. Mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam kemajuan teknologi dilakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Sehingga secara sosial dan ekonomi terjadi pertumbuhan yang seimbang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan sebagai penelitian ini :

1. Desyana Eka Pramasty & Lydia Rosintan S (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Di Tujuh Negara ASEAN” menyatakan Kebijakan Fiskal & Moneter yang efektif dan baik dapat menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara demi tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Nurul Izzah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah” menyatakan Kebijakan Fiskal dan Moneter yang efektif dapat menjaga kestabilan ekonomi yang mana dapat mendorong laju pertumbuhan disuatu wilayah tersebut dengan meningkatkan pembangunan baik di sektor ekonomi maupun potensi di sumber daya alamnya.
3. Wasiaturahma (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Komparasi Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Jangka Pendek dan Jangka Panjang Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” menyatakan pengaruh Kebijakan Moneter cukup signifikan dalam mempengaruhi perekonomian secara nasional hingga taraf yang cukup tinggi, begitupun dengan Kebijakan fiskal, namun untuk jangka panjang pengaruhnya lebih kecil dan tidak terlalu signifikan.

4. Mahdi, Hasdi Aimon & Efrizal Syofyan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi” menyatakan Kebijakan Fiskal dalam kegiatan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dikarenakan akan mendorong terjadinya pembangunan ekonomi, sedangkan dalam Kebijakan Moneter berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, karena apabila suku bunga tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.
5. Wasiaturahma (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Penerimaan Negara Dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia” menyatakan Kebijakan Fiskal Indonesia yang kontraktif berupa upaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan dan bea cukai memiliki pengaruh yang positif dan cukup signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

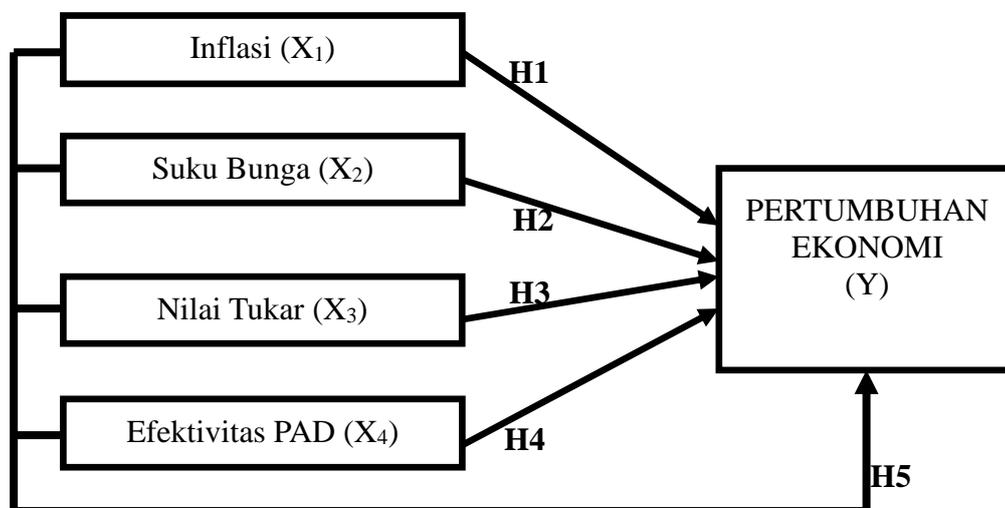
No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Desyana Eka Pramasty, Lydia Rosintan S (2014)	Analisis Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Di Tujuh Negara Asean	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Utang Luar Negeri • Investasi Asing Langsung • Inflasi Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Utang luar negeri dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara. Sedangkan Investasi asing langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Nurul Izzah (2012)	Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi • GPDRB • GED • Pajak • GDPK • Suku Bunga Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Inflasi, Pajak dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk GPDRB, GED, dan GDPK memberi dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa tengah
3	Wasiaturrahma (2011)	Komparasi Efektivitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Uang Beredar • Pengeluaran Pemerintah • Penerimaan Pemerintah Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Jika terjadi kenaikan 1% pengeluaran pemerintah maka akan menurunkan 0,14% pendapatan nasional, Dan jika terjadi kenaikan 1% penerimaan negara maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.26%.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Mahdi, Hasdi Aimon & Efrizal Syofyan (2013)	Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Uang Beredar • Pengeluaran Pemerintah • Pajak • Suku Bunga Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Pengeluaran pemerintah dan Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sedangkan Pajak dan suku bunga berpengaruh signifikan dan negatif.
5	Wasiaturahma (2013)	Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Penerimaan Negara Dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Pengeluaran Pemerintah • Investasi Pemerintah Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Negara • Pertumbuhan Ekonomi 	Sektor pajak dan bea cukai memiliki pengaruh yang positif dan cukup signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan dalam pengeluaran negara lebih di kontrol lagi karena dapat terjadi penyelewengan yang mengganggu jalannya pembangunan ekonomi negara.

2.3. Kerangka Penelitian

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga Kebijakan Moneter dalam hal Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kota Batam.
- H₂ : Diduga Kebijakan Moneter dalam hal Suku Bunga berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kota Batam.
- H₃ : Diduga Kebijakan Moneter dalam hal Nilai Tukar berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kota Batam.
- H₄ : Diduga Kebijakan Fiskal dalam hal Efektivitas PAD kota Batam berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kota Batam.
- H₅ : Diduga Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar & Efektivitas PAD secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kota Batam.